

Penanganan Longsor Sungai Cidepit Dipercepat, Dimulai April 2024

BOGOR (IM) - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane berupaya mempercepat penanganan longsor di Sungai Cidepit, Gang Makam, Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor.

Kepala UPTD PSDA Wilayah Ciliwung Cisadane Provinsi Jawa Barat, Hendra Wardhana mengatakan, penanganan longsor direncanakan pada bulan April 2024. "Iya kurang lebih (bulan April 2024) tapi sedang kita upayakan percepatannya," kata Hendra saat dihubungi, Jumat (8/3).

Proses pengadaan penyediaan barang dan jasa tengah dilakukan. Penanganan longsor Sungai Cidepit bakal menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

Nantinya, UPTD PSDA akan mengembalikan elevasi dasar saluran irigasi ke elevasi semula serta penguatan tanggul saluran. Penanganan longsor Sungai Cidepit terkesan lambat karena harus menyesuaikan anggaran terlebih dahulu.

"Harus ada penyesuaian pos anggaran dengan fokus bencana," ujar Hendra.

Sambil menunggu penanganan longsor oleh PSDA, Kepala BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh mengimbau agar masyarakat menjauhi lokasi longsor. Sebab, tanah di sekitaran lokasi longsor cenderung labil. Dikhawatirkan longsor susulan kembali terjadi. "Saya berikan imbauan dan memberikan larangan untuk tidak mendekati atau warga menonton longsor," kata Hidayatulloh. ● pra

Penertiban PKL Pasar Kebon Kembang Ditunda, Kasatpol PP: 'Cooling Down' Dulu

BOGOR (IM) - Satpol PP Kota Bogor menunda penertiban pedagang kali lima (PKL) yang berjualan di jalur pedestrian Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach, mengatakan, penertiban ditunda karena adanya penolakan dari PKL.

Meskipun demikian, pihaknya sudah berkali-kali berkomunikasi kepada para PKL terkait rencana penertiban. "Kita cooling down dulu, pedagang di situ bukan bukan rencana penertiban, sudah sering," kata Agustian Syach saat dihubungi, Jumat (8/3).

Dalam penertiban itu, Satpol PP menghindari ad-

anya paksaan agar tidak bertentangan dengan PKL, seperti yang terjadi pada Senin (4/3).

Agustian merasa ada kelompok lain di luar pedagang yang mencoba memengaruhi suasana saat penertiban berlangsung.

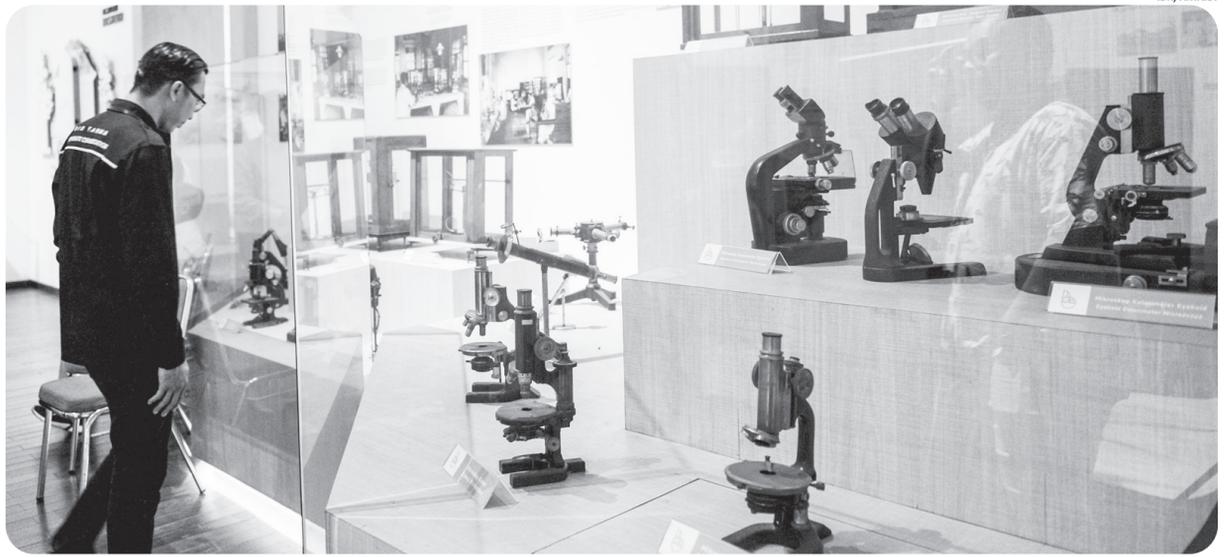
"Ada yang mencoba memantik ramai-ramai kerusuhan di Kota Bogor. Ada orang-orang baru yang baru saya lihat, di situ dia bukan pedagang," kata dia.

Nantinya, Agustian akan kembali mengundang para PKL untuk berdiskusi soal rencana relokasi.

"Nanti kita rapatkan dulu, kita tunda dulu. Nanti kita panggil mereka para pedagangnya," ujar Agustian. ● pp

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



MUSEUM SEJARAH KESEHATAN BIO FARMA

Pengunjung mengamati koleksi alat kesehatan di Museum Bio Farma, Bandung, Jabar, Jumat (8/3). Museum Bio Farma yang menceritakan tentang penemuan kesehatan, wabah yang terjadi sebelum vaksin ditemukan, serta peralatan yang digunakan sebelum Bio Farma ada tersebut telah sesuai dengan standarisasi museum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2019 karena telah terverifikasi memenuhi kategori persyaratan standarisasi.

Dalam Sebulan, 27 Ton Limbah B3 dan Non B3 Masuk ke Bogor

Limbah-limbah ini adalah sisa produksi perusahaan industri yang tidak bisa digunakan kembali, sehingga perlu dilebur.

CIBINONG (IM) - Puluhan ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 memasuki kawasan Kabupaten Bogor setiap bulannya.

Sedikitnya ada 25 hingga 27 Ton limbah industri yang masuk ke Kabupaten Bogor, 69 persen di antaranya adalah limbah B3.

Limbah-limbah ini adalah

sisa produksi perusahaan industri yang tidak bisa digunakan kembali, sehingga perlu dilebur.

"Hitungan setelah pandemi, dalam 1 bulan itu ada 25 hingga 27 ton limbah," kata Technical support manager PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Muhammad Yusuf Firdaus, Jumat (8/3).

Sebanyak 27 ton limbah yang masuk untuk dilebur memiliki berbagai macam jenis, di antaranya B3 dan Non B3.

"Macam-macam limbah, bukan yang berbahaya saja, tapi ada industri, makanan kadaluarsa, dan juga bahan yang basi. Kalo limbah B3 itu bisa sampai 69 persen dari total seluruh jumlah limbah diterima," paparnya.

Limbah-limbah yang nantinya akan dikubur di landfill yang dimiliki perusahaan pengelola limbah B3 tersebut berasal dari kiriman perusahaan industri yang berada di seluruh Indonesia. Saat ini, PPLI sendiri me-

iliki 68 hektare tanah untuk dijadikan landfill. Landfill sendiri berguna untuk mengubur limbah yang telah dileburkan.

Di atas limbah yang telah

dikubur tersebut, PPLI kembali mengindahkannya dengan penghijauan, sehingga landfill tersebut terlihat seperti bukit yang hijau nan indah. ● gio

RUSAK AKIBAT TANAH BERGERAK

12 Rumah di Jombang Ditinggal Pemiliknya

JOMBANG (IM) - Belasan rumah di Dusun Sumberlamong, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur rusak parah akibat pergerakan tanah pada Rabu (6/3).

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mendata terdapat 12 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak ini. Mengutip dari detikJatim pada Jumat (8/3), sebanyak 34 orang penghuni dari 12 rumah yang rusak tidak dapat kembali ke rumah mereka.

Hal ini dikarenakan terlalu berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa jika kembali menempati rumah tersebut. Ditambah kondisi rumah yang berada di perbukitan dengan kemiringan 45 derajat rawan terjadi longsor. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat dekat.

"Kondisinya sudah parah

tidak bisa ditempati. Dari semua rumah ini tanahnya amblas. Untuk sementara ini kami upayakan bantuan untuk makan. Untuk tindakan selanjutnya kami serahkan ke BPBD," kata Kepala Desa Sambirejo Sungkono, Sungkono, Jumat (8/3). Pergerakan tanah di Desa Sambirejo, Jombang bukan hanya berdampak pada 12 rumah warga, melainkan akses jalan juga ikut terputus.

Awal mula pergerakan tanah di Desa Sambirejo, Jombang ini terjadi pada tengah malam saat hujan deras. Sungkono menuturkan keretakan tanah sudah terdeteksi 1 bulan lalu, tetapi pemilik rumah enggan untuk mengungsi. Keretakan tanah tersebut bertambah parah akibat hujan deras dan menimbulkan bencana tersebut.

"Karena tanahnya tanah labil, karena hujan yang lebat akhirnya menimbulkan keretakan semakin parah," jelas Sungkono. ● pra

Indramayu Latih 1.000 Pemuda Jadi Petani Milenial

INDRAMAYU (IM) - Pemkab Indramayu siap mencetak 1.000 petani muda yang diharapkan mampu mengubah wajah pertanian menjadi lebih segar. Tak hanya itu, petani muda juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Pelatihan 1.000 Petani Muda Indramayu itu diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu. Kegiatan dipusatkan di UPTD Perlindungan dan Pembenhian Hortikultura DKPP Kabupaten Indramayu, di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang.

"Pelatihan itu juga upaya untuk mengurangi problem ketersediaan tenaga kerja pertanian di Kabupaten Indramayu," ujar Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto, Jumat (8/3).

Dari 1.000 peserta pelatihan petani muda itu, dibagi menjadi 20 angkatan. Setiap angkatan, terdiri dari 50 orang yang merupakan pemuda Indramayu. Setiap angkatan, dilaksanakan selama dua hari. Untuk angkatan pertama, dilaksanakan pada 7-8 Maret 2024.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina, mengatakan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah produsen beras yang mendukung pangan nasional. Adapun luas baku sawah di Kabupaten Indramayu sebesar 125.442 hektare, atau 59,75 persen dari luas wilayahnya yang mencapai 209.942 hektare.

Diketahui dari luas baku sawah 125.442 hektare tersebut, telah menghasilkan produksi padi pada 2022 sebesar 7,35 ton per hektare. Dengan capaian tersebut, maka Kabupaten Indramayu pada 2022 mendapat peringkat pertama nasional sebagai produsen padi tertinggi.

Sedangkan pada 2023, produksi padi turun menjadi rata-rata 7,0 ton hektare. "Tahun kemarin produksi padi kita mengalami penurunan yang disebabkan oleh el nino ekstrem melanda Kabupaten Indramayu," kata Nina.

Sementara itu, kepada peserta pelatihan petani muda, Nina meminta agar mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu semaksimal mungkin. Dia menyatakan, ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. ● pra



IDN/ANTARA

AKSI HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL DI BANDUNG

Massa yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan membawa foto Marsinah dalam aksi saat peringatan Hari Perempuan Internasional 2024 di Bandung, Jabar, Jumat (8/3). Acara ini dijadikan momentum untuk berkampanye dan menuntut kesetaraan, inklusivitas dan menghapus kekerasan seksual pada perempuan.

DITERJANG BENCANA TANAH LONGSOR

Akses Ruas Jalan Cibodas-Suntenjaya Lembang Lumpuh

NGAMPRAH (IM) - Bencana tanah longsor yang diakibatkan hujan deras kembali terjadi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tepatnya di ruas jalan penghubung antar Desa Cibodas-Suntenjaya.

Akibat bencana tanah longsor tersebut, akses jalan di lokasi tak bisa dilewati kendaraan akibat material longsor yang menutupi badan jalan.

"Kejadian longsornya kemarin Kamis (7/3) dan berasal dari tebing setinggi 10 meter dengan lebar 13 meter," kata Kepala Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, KBB, Asep Wahono saat dikonfirmasi.

Meski begitu, sambung Asep, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana tanah longsor tersebut lantaran tidak ada pengendara yang melintas.

Kendati demikian, selama material tanah longsor itu belum disingkirkan dan dibersihkan maka aksesibilitas warga jadi terganggu.

"Karena akses jalan itu cukup vital dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari warga Suntenjaya yang hendak ke Cibodas atau sebaliknya," ujarnya.

Sementara ini, pengguna kendaraan diarahkan ke jalan alternatif agar tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Meskipun jaraknya lebih jauh dan memutar namun tidak ada pilihan bagi warga selama akses jalan yang tertutup longsor belum terbuka.

"Puluhan warga dibantu kepolisian dan TNI berusaha menyingkirkan material longsor dari badan jalan dengan alat seadanya," ucapnya.

Pihaknya berharap, ada alat berat yang didatangkan dari instansi terkait agar proses pembersihan longsor lebih cepat.

"Kalau dilakukan manual akan memakan waktu lebih lama, makanya harapannya Pemda KBB bisa menurunkan bechoc supaya penanganan lebih cepat," harapnya.

Selain memutus akses jalan, sebut Asep, longsor juga merusak dua bangunan warga namun para korban terdampak tidak sampai mengungsi.

"Rumah warga yang rusak hanya pada bagian dapur karena tertimpa tanah tebing, tidak sampai mengungsi," tandasnya. ● pra

ANTISIPASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI

DPRD Kota Bogor Siapkan Perencanaan Cegah Banjir

BOGOR (IM) - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang diketuai Bambang Dwi Wahyono mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Raperda yang diinisiasi DPRD Kota Bogor ini disebutkan Bambang sebagai langkah konkret untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Bogor.

"Kami melihat dalam beberapa tahun terakhir ini banyak banjir yang terjadi di berbagai titik di Kota Bogor.

Berdasarkan analisa kami, banjir itu diakibatkan buruknya sistem drainase. Untuk itu, kami mencoba menyusun Raperda yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya, kemarin.

Dalam rapat ini, Tim Pansus DPRD Kota Bogor membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dengan

tenaga ahli dan Pemerintah Kota Bogor.

Dalam draft Raperda yang disusun, Bambang mengungkapkan untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, maka pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

"Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase itu dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras," jelas Bambang.

Bambang juga kembali menekankan, pengaturan drainase sangat penting untuk mengatasi debit banjir, genangan air, penyimpanan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase agar diperlukan pengaturan mengenai sistem drainase yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Hal itu tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

"Kami juga menargetkan Raperda ini selesai sebelum habis masa periode DPRD Kota Bogor 2019-2024 pada Agustus mendatang," ungkapnya. ● pra



IDN/ANTARA

AKSI HIJAU DAN BERSIH NEGERI

Pj Gubernur Banten Al Muktabar menanam pohon saat acara Aksi Hijau dan Bersih Negeri di kompleks Kesultanan Banten di Kasemen, Kota Serang, Jumat (8/3). Acara tersebut digelar Pemprov Banten bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global.